KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : sorot: DPR yang sibuk bersolek
Tanggal : Senin, 17 November 2014
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 23

SOROT

DPR yang Sibuk Bersolek

MASIH segar dalam ingatan, adanya harapan baru dalam menyongsong para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 untuk bisa membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Indonesia. Sejak mereka dilantik pada 1 Oktober 2014 hingga saat ini, rakyat masih dalam kondisi menanti realisasi janji-janji dari para wakil rakyat itu.

Namun, belum genap sebulan bekerja, keinginan untuk membangun gedung baru muncul kembali. Ya, keinginan serupa sempat tercetus pada 2010. Saat itu, para anggota dewan takut berkantor di gedung yang kini berusia 23 tahun dan masih tegak berdiri karena dinyatakan telah miring 7-8 derajat.

Kini gagasan itu muncul dengan alasan yang berbeda. Dengan berawal dari gagasan pribadi, kebutuhan ruangan karena banyaknya staf pun mencuat menjadi alasannya.

Padahal, dalam sebulan lewat ini dewan belum bekerja sama sekali. Bahkan situasi politik di parlemen belum juga menemukan titik temu.

Hal itu juga sangat kontraproduktif dengan semangat efisiensi yang telah ditiupkan pemerintahan baru. Problem efisiensi menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan supaya beban anggaran negara menjadi lebih ringan.

Saat ini, postur anggaran belanja negara, juga belanja daerah, pada umumnya masih lebih memberatkan unsur belanja rutin, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas para pejabat. Sebaliknya, belanja pembangunan pada umumnya mendapatkan porsi yang lebih kecil.

Karena itu, rakyat mesti membuka mata lebar-lebar untuk mengawasi dewan. Jangan pernah lelah, apalagi lengah, untuk mengawasi perilaku dewan. Rencana pembangunan gedung baru DPR itu harus dihentikan. Jangan biarkan rencana itu muncul setiap saat.

Pembagian anggaran seperti itu setidaknya memberi gambaran bahwa semangat para penentu kebijakan di negeri ini masih memilih untuk menggunakan anggaran bagi kepentingan sekelompok elite saja. Masyarakat luas hanya bisa mendapatkan kue pembangunan yang porsinya lebih sedikit.

Membangun gedung baru tidaklah tabu. Akan tetapi, menjadi tabu apabila wakil rakyat mengabaikan rakyat dan mementingkan diri mereka sendiri.

Itu sangat tidak etis sebagai politisi yang memperoleh jabatan karena dipercaya konstituen. Terlebih, bukan perkara besar bagi DPR untuk menyetujui pembangunan gedung baru sebab kini parlemen sudah dikuasai satu kubu.

Karena itu, rakyat mesti membuka mata lebar-lebar untuk mengawasi dewan. Jangan pernah lelah, apalagi lengah, untuk mengawasi perilaku dewan. Rencana pembangunan gedung baru DPR itu harus dihentikan. Jangan biarkan rencana itu muncul setiap saat.

Bekerja tekun dalam kondisi serbaprihatin akan melahirkan pemimpin yang tangguh. Sebaliknya, pemimpin manja akan sibuk bersolek dengan berbagai fasilitas aduhai demi dirinya sendiri.

Tidak ada kebutuhan mendesak saat ini dari pembangunan gedung baru DPR, kecuali agar anggota dewan nyaman bekerja ketika sebagian besar rakyat hidup penuh kesusahan.

Rakyat juga khawatir rencana pembangunan gedung baru itu semata-mata menggunakan pendekatan proyek. Bila itu terjadi, di balik pendekatan proyek selalu ada celah manipulasi nilai proyek.

Lebih lagi, pembangunan gedung baru bukan menghasilkan citra DPR yang baik, melainkan justru sebaliknya. Pembangunan gedung baru DPR di saat seperti ini justru akan memperburuk rupa DPR.

Citra harus dibangun dalam konteks perbaikan tingkat kepercayaan publik. Perbaikan itu hanya bisa dilakukan dengan kehadiran politisi yang berintegritas dan berkinerja apik. Jadi, citra harus menjadi pesona yang muncul dari perbaikan perilaku politisi, bukan dengan memoles aksesori yang memajang indah, tetapi menyembunyikan kebusukan perilaku anggotanya. (Astri Novaria/P-1)

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

GALERI PENDAPAT

DENGAN alasan ingin menambah dan memperlebar ruangan untuk menampung asisten pribadi dan staf ahli, muncul ide membangun gedung baru bagi anggota DPR. Gedung DPR yang berdiri kukuh dan luas saat ini dianggap tidak mencukupi untuk menampung kebutuhan kerja anggota DPR periode 2014-2019.

"MEMANG ada kebutuhan ruangan yang diperlukan DPR, tetapi belum dapat dipastikan apakah solusinya mengharuskan pembangunan gedung baru atau tidak. Terkait wacana ini belum ada pembahasan serius dengan BURT. Kalau bicara kebutuhan, ya butuh. Karena ruang anggota kecil sementara stafnya banyak dan enggak punya ruang untuk menampung. Tetapi apakah solusinya membangun, itu belum tahu. Belum dibicarakan sampai situ."
(Nov/P-2)



ANTARA

Winantuningtyastiti
Sekjen DPR



MI/M IRFAN

Al Muzammil Yusuf
Anggota DPR (F-PKS)

"DI dalam UU MD3 ada penambahan jumlah tenaga ahli dan asisten pribadi untuk setiap anggota dewan. Penambahan tersebut perlu dilakukan untuk menunjang tiga fungsi DPR ditambah satu lagi, yakni menyerap aspirasi rakyat.

Ya, memang di UU MD3 yang baru ini jumlah tenaga ahli ada lima orang dan dua asisten pribadi. Periode sebelumnya ada dua tenaga ahli dan satu asisten pribadi. DPR kan punya tugas legislasi setiap anggota. Jadi, satu anggota untuk memproduk legislasi kemudian ada juga yang ditugaskan di dapil. Aspirasi dari dapil ditampung oleh asisten pribadi dan tenaga ahli kita." (Nov/P-2)



MI/SUSANTO

Firman Soebagyo
Wakil Ketua Baleg (F-Golkar)

"NANTINYA tenaga ahli dan asisten pribadi ini ditempatkan satu ruangan dengan setiap anggota DPR. Untuk tenaga ahli yang ditempatkan di alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan badan lainnya di DPR, ditempatkan terpisah dari pimpinan AKD.

Tenaga ahli ditempatkan satu ruangan dengan anggota dewan tapi untuk tenaga ahli yang ditempatkan di AKD ada ruangan khusus untuk mereka. Akan tetapi, ada kemungkinan jumlah tenaga ahli bagi setiap anggota dewan akan bertambah. Hal itu tentunya sesuai degan persetujuan ketua BURT DPR. Jadi memang memerlukan ruangan yang lebih luas." (AI/P-2)

PERPUSTAKAAN DPR-RI



AFP

Edhy Prabowo
Anggota DPR
(Waketum Gerindra)

"RUANG kerja anggota dewan saat ini masih cukup memadai. Uang yang direncanakan membangun gedung baru DPR bisa dialokasikan untuk program lain yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Gedung ini masih layak dan mampu menunjang semua pekerjaan kami.

Saya pikir, kantor yang ada sekarang masih cukup memadai meski kinerja kami belum berjalan optimal karena jumlah tenaga ahli dan kapasitas ruangan yang *overload*, tapi kita harus realistis dalam melihat keadaan." (Nov/P-2)



MI/USMAN ISKANDAR

Dossy Iskandar Prasetyo
Ketua Fraksi Partai Hanura

"BURT DPR harus menjelaskan secara komprehensif transparansi atas rencana pembangunan gedung baru DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Urgensinya apakah sudah mendesak, apakah ruang itu memang tidak mencukupi atau tidak itu semua harus dijelaskan secara terbuka.

Pembangunan dengan dilengkapi fasilitas kolam renang dan spa tidak rasional dan tidak perlu bagi anggota wakil rakyat itu. Penggunaan anggaran yang ketat termasuk pengawasannya agar tidak terjadi penggelembungan anggaran (korupsi) harus dilakukan serius.

Yang rasional saja ruangan. Fasilitas yang tidak perlu tidak usah." (SU/P-2)